

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Struktural APBD yang merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua

penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Sedangkan, Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Sebagai salah satu daerah yang diberikan otonomi oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yakni Pemda Kota Parepare diharapkan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan daerahnya sebagai rangkaian program pemerintah yang dilaksanakan terus-menerus yang mana memerlukan biaya yang besar walaupun dengan keterbatasan dana. Untuk itu pendapatan daerah diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi pengeluaran atau belanja daerah yang juga semakin meningkat. Hal ini berarti anggaran daerah diharapkan pula meningkat secara riil. Dalam kaitan inilah, maka dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah perlu dikembangkan secara lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan Daerah Kota Parepare selama lima tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada table 1 berikut:

**Tabel 1 : Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare**

Tahun Anggaran	Target APBD	Perkembangan (%)	Realisasi APBD	Perkembangan (%)
2010	497.002.404.415,00	-	422.485.397.839,81	-
2011	589.622.580.566,00	18,64	483.240.241.270,12	14,38
2012	602.079.669.374,55	2,11	532.812.918.945,64	10,26
2013	648.995.986.536,27	7,79	614.513.936.577,34	15,33
2014	695.135.725.888,00	7,11	710.496.023.652,70	15,62

Sumber: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Target APBD kota Parepare selama 5 tahun anggaran yang diteliti mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Dimana persentase pertumbuhan target tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan pertumbuhan sebesar 18,64% dari tahun anggaran 2010, tingginya persentase perkembangan target pada tahun tersebut disebabkan karena jumlah anggaran Dana Perimbangan khususnya Pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang dianggarkan meningkat dengan persentase yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012 persentase perkembangan target mengalami pertumbuhan yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 2,11% dari tahun 2011, penyebabnya yaitu jumlah anggaran dari Pos Retribusi Daerah serta Pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang dianggarkan pada tahun tersebut diturunkan secara drastis apabila dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2013 persentase perkembangan target APBD kota parepare kembali mengalami pertumbuhan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 7,79%, hal ini karena jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah serta Pos Dana Alokasi Umum yang dianggarkan pada tahun tersebut cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2014 persentase perkembangan target mengalami pertumbuhan yang sedikit menurun dari persentase perkembangan target pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,11%, hal ini disebabkan karena jumlah anggaran dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dianggarkan sedikit diturunkan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Perkembangan Realisasi APBD kota Parepare selama 5 tahun anggaran yang diteliti juga mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Dimana persentase

perkembangan realisasi pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 14,38% dari tahun anggaran 2010, hal ini disebabkan karena tingginya kontribusi dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012 persentase perkembangan realisasi APBD mengalami pertumbuhan yang sedikit menurun dibandingkan persentase perkembangan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,26%, penyebabnya yaitu terjadi penurunan jumlah pendapatan yang sangat besar dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah apabila dibandingkan dengan jumlah kontribusinya pada tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2013 persentase perkembangan realisasi APBD kota Parepare mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 15,33%, hal ini karena peningkatan kontribusi dari bagian Pendapatan Asli Daerah serta Pos Dana Alokasi Umum yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2014 persentase perkembangan realisasi APBD kembali mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 15,62% dari tahun 2013, disebabkan oleh peningkatan kontribusi dari bagian Pendapatan Asli Daerah terutama pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Disamping itu, berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kota Parepare selama lima tahun terakhir secara riil mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Tetapi walaupun pendapatan daerah kota Parepare mengalami peningkatan tiap tahunnya namun pencapaian atau realisasi pendapatan daerah kota Parepare dalam empat tahun tidak mencapai target yaitu pada tahun Anggaran 2010-2013 dan hanya pada Tahun Anggaran 2014 realisasi pendapatan daerah kota Parepare dapat melampaui target pendapatan yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya beberapa pos-pos atau sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak bisa mencapai target pendapatan yang diberikan atau penerimaan daerah yang masuk dari pos-pos tersebut sangat jauh dari target.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Kota Parepare di Kota Parepare”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :“Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 – 2014 Pemda Kota Parepare”.

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengefektifkan penerimaan APBD dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan potensi daerah yang ada.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan penelitimengenai masalah keuangan daerah.

3. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya dibidang yang sama dan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah.